

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TABANAN

Oleh : I Ketut Suardana¹

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi angin segar bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan di sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan kualitas kehidupan masyarakat pesisir. Hal ini dilakukan melalui diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta meningkatkan nilai ekspor.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tabanan selama periode pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya produksi ikan, konsumsi ikan masyarakat, pendapatan nelayan, pemasaran ikan antar pulau, dan ekspor. Selain itu, sektor ini juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas peluang usaha di bidang kelautan dan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan, serta untuk mengevaluasi dampak retribusi daerah terhadap penerimaan PAD di sektor ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan telah secara maksimal menjalankan berbagai upaya inovasi sesuai perannya, sehingga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan PAD. Temuan ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kabupaten Tabanan, Peningkatan Pendapatan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tabanan.

¹ STISIP Margarana Tabanan email. Suardanaketut360@gmail.com

1. Pendahuluan

Dengan di berlakukan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi sebuah angin segar bagi pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri. Undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah ini, merupakan sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca reformasi. Setelah sekian lama mengalami pasang surut melalui proses amandemen,

mulai dari masa orde lama sampai pasca reformasi sekarang ini. Otonomi daerah yang kini telah berjalan selama kurang lebih empat belas tahun, masih kerap menjadi perdebatan hangat di kalangan praktisi dan kalangan ilmuwan.

Dari sekian banyaknya kewenangan yang didesentralisasi (diberikan) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada kewenangan yang kerap menjadi sorotan, yaitu kewenangan yang dapat berpotensi menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya kewenangan pemerintah untuk mengelola sektor pertanian, pariwisata, migas, perikanan kelautan serta sektor lainnya sesuai dengan kondisi geografis daerah masing-masing. Pada dasarnya, persoalan otonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah bukanlah suatu yang baru. Sejak orde lama hingga sekarang, permasalahan otonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah kerap mencuak di publik. Pembagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam

Selanjutnya dijelaskan lebih jauh pada pasal 18 ayat (2) yang berbunyi dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dari penjabaran pasal ini, sebagian daerah merasa tidak puas, hal ini dikarenakan daerah yang memiliki potensi penangkapan ikan yang lebih besar merasa tidak adil karena telah menyettor kepada Pemerintah pusat dengan jumlah yang lebih besar dibanding daerah-daerah lain, sementara dana bagi hasilnya dibagikan secara sama besar untuk setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Republik ini. Sesuai dengan pasal 18 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kabupaten-Kota diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan itu adalah sepertiga dari wilayah kewenangan laut propinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, jadi kewenangan Kabupaten-Kota sejauh 4 (empat) mil laut. Batas kewenangan tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil, yaitu nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, karenanya bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kabupaten Tabanan sebagai daerah otonom memiliki luas laut yang besar serta garis pantai yang membentang dari Perbatasan Kabupaten Badung samapai

Kabupaten Negara. Kondisi geografis dan keadaan alam ini memberikan peluang bagi Kabupaten Tabanan untuk mengembangkan sektor perikanan. Potensi perikanan ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang peningkatan APBD Kabupaten Tabanan.

Olehnya itu, dengan potensi yang ada maka pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sebagai pemegang otoritas untuk mengelola sumber daya alam ini dituntut untuk perencanaan yang matang serta sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan. Kekayaan sumber daya alam dari sektor perikanan ini telah menjadi primadona. Hal ini ditandai oleh peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Namun peningkatan ini belum bisa dinilai sebagai sebuah keberhasilan dari pemerintah dalam upayanya mengelola sektor ini. Hal ini disebabkan oleh, pencapaian yang telah direncanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan sebagai dinas yang mengelola sektor ini belum bisa

bisa mencapai target atau hasil yang diharapkan sebelumnya. Kondisi ini tergambar dari data yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan daerah kabupaten Tabanan yang mendeskripsikan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor perikanan pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 tidak pernah mencapai target yang direncanakan. Ketidakberhasilan pencapaian target ini merupakan pekerjaan rumah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius demi pengembangan sektor perikanan. Berdasarkan hal tersebut penting untuk diketahui posisi dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan sebagai pengelola sektor perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dengan judul “Peranan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tabanan”

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan meliputi mencari dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan-bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun proposal lain dalam upaya mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang peneliti teliti sebagai berikut:

- a. Rahmat Kristianto Nugroho, 2013. Judul Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa kontribusi sektor kelautan dan Perikanan terhadap PAD Yogyakarta pada tahun 2015-0,060%,2016- 0,087%,2017-0,079%, 2028-0,072%, 2019-0,078%. Dan naik dan turunnya PAD Dari sektor kelautan dan perikanan disebabkan karena rendahnya budaya bahari Masyarakat DIY, minimnya pelabuhan yang memadai, kurangnya SDM, Tingginya biaya oprasional, kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan rendahnya konsumsi ikan masyarakat. Sedangkan usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PAD dari sektor kelautan dan perikanan adalah dengan mengubah paradigma masyarakat melakukan bimbingan teknis, mengedukasi masyarakat menggunakan alat tangkap modern ; mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil neayan, membuat kelompok usaha bersama (KUB) mempermudah izin dan menghibahkan sejumlah kapal kepada nelayan.
- b. Muhammad Nur Taufi Siddik, 2016, judul Manajemen Retribusi Pada Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor. Yang mempengaruhi, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung dan penghambat dinas kelautan dan perikanan dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan

di Kabupaten Baru.

- c. Phutut Eka Pramana, 2017, Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Mengali Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perikanan Kota Bitung, Adapun hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi perikanan di Kota Bitung Sangatlah besar, dan di dukung dengan sumber daya perikanan yang melimpah. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian ini menggunakan tiga kategori informan, yaitu (1) Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan, (2) Informan utama dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, dan (3) Informan tambahan dalam penelitian ini adalah siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang sekiranya dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti dikarenakan orang-orang yang berada disana tidak menjadi masyarakat tetap akan tetapi mereka mengetahui apa yang menjadi permasalahan pada masyarakat Dusun Batman.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk Mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Arikunto (2012:139) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.” Menurut Sudarso (2012:25) menyatakan bahwa “Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.” Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian merupakan pembahasan tentang konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan juga kekurangannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

Adapun jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan mengenai “Peranan Sektor kelautan dan Perikanan dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan”. Jenis Penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat.

4. Hasil Dan Pembahasan

Dinas Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam Garis-Garis besar Haluan Negara pada Bab IV Pembangunan Lima Tahun Tahap Keenam bagian F bidang ekonomi butir 2 dikatakan bahwa “Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilanjutkan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan tingkat kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan versifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor.

Pendapatan sektor kelautan dan perikanan bersumber dari penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan sumber penerimaan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Keterangan Asal (SKA) mengacu pada Undang- Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal selama empat tahun terakhir dari tahun 2020- sampai dengan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan Tahun 2021 (Rp) 344170273,- Tahun 2022 (Rp) 175210025,-Tahun 2023(Rp)100.000.000, Tahun 2024(RP)100.000.000,-

- b. Pengumpulan Tahun 2021 150.000.000,- Tahun 2022 (Rp) 150420050 Tahun 2023 (Rp) 130250150 Tahun 2024 (Rp) 100.115.350
- c. Penghasilan Tahun 2021 (Rp) 150.000.000,- Tahun 2022 (Rp) 125.210.025,-Tahun 2023 (Rp) 100.250.050,- Tahun 2024 (Rp) 120.000.000,- Mencari tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rata-rata Kenaikkan harga dari sumber penerimaan retribusi yang berasal dari penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal (SKA) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tabanan ini per tahun meningkat secara signifikan.

Data tersebut menunjukkan penurunan signifikan dalam pendapatan dari kegiatan penangkapan, sementara pendapatan dari pengumpulan dan penghasilan juga mengalami fluktuasi. Menurut penelitian oleh Mardani Nursali (2017: 22), penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks Kabupaten Tabanan, penurunan pendapatan dari SIUP dan SKA dapat berdampak negatif terhadap PAD, mengingat pentingnya sektor perikanan dalam struktur ekonomi daerah.

Selain itu, studi oleh Arab Mustariba (2022: 43) menunjukkan bahwa retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penurunan pendapatan dari SIUP dan SKA di Tabanan mungkin mencerminkan tantangan dalam pengelolaan retribusi sektor perikanan, yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan melalui pelaksanaan berbagai program yakni: Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan berupa pengadaan sarana pengolah ikan dan pengadaan sarana pemasaran ikan, pengembangan sistem penyuluhan perikanan berupa pembinaan sumber daya manusia dan pengadaan alat ukur kualitas air, dan pengembangan budidaya perikanan berupa pengembangan bibit ikan unggul, rehabilitasi saluran irigasi tambak,

pembinaan dan pengembangan perikanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan di Kabupaten Barru yaitu :

a. Faktor pendukung

- ✓ Sinergitas dari setiap elemen pemerintah yakni kerja sama antara pemerintah setempat dan masyarakat.
- ✓ Partisipasi pembudidaya yakni pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat respon positif dari pembudidaya (pemilik tambak).

b. Faktor penghambat

- ✓ Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah yakni dalam hal memanfaatkan teknologi perikanan yang sudah meningkat pesat seperti cara pengukuran kualitas air.
- ✓ Cuaca yang tidak menentu terjadi perubahan iklim terhadap budidaya perikanan karna dapat merusak kelangsungan hidup budidaya yang dapat menyebabkan kematian.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Barru melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan program yang ada sebaiknya menambah pengadaan bibit, pengukur air karna masih banyak pembudidaya yang belum dapat program ini dan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pembudidaya sehingga dapat mengikuti perkembangan sistem perikanan yang semakin maju.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru diharapkan agar kegiatan penyuluhan lebih sering dilakukan dan lebih mendekat kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima ilmu yang diajarkan Dan dapat dipraktekkan dengan baik. Sehingga nantinya para pembudidaya dapat merasakan hasil panen yang berkualitas dan pendapatan yang meningkat. Dan dari segi cuaca yang tidak menentu yang sering mengancam keberlangsungan budidaya yang biasa menyebabkan kematian hingga hasil panen

yang tidak maksimal. ketika kondisi itu terjadi maka dari pihak dinas kelautan dan perikanan harus memberikan bantuan berupa obat-obatan kepada pembudidaya agar nantinya budidaya yang dikelola bisa menghasilkan dalam artian pembudidaya tidak mengalami kerugian dan retribusi pembudidaya pun lancar sehingga pendapatan asli daerah dari sektor perikanan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman, Soejono. 1999. Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan. Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Azikin, & Inu Kencana. 2007. Perbandingan Pemerintahan. Refika Aditama, Bandung.
- Haris, Syamsuddin. 2007, Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press, Jakarta.
- Haw, Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi uu no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haw, Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hidjaz, M. Kamal. 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Huda, Ni`matul. 2014 Desentralisasi Asimetri Dalam NKRI, Nusa Media, Bandung.
- Kaho, Josep Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, 2007. Ekonomi Kelautan, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta. Jakarta.

Mustariba, Arab, 2022. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap PAD di Sulawesi Selatan*. Dinas Keuangan Daerah Sulawesi Selatan..

Nugroho D, Riant. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi, Tanpa Revolusi*, PT Gramedia. Jakarta.

Nursali, Mardani, 2017. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yani, Ahmad. 2013, *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rajawali Pers. Jakarta.

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Sinar Harapan. Jakarta